

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peralihan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi memperoleh respons yang positif, khususnya sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi ini terjadi karena otonomi daerah tidak hanya dipahami sebagai pemindahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melainkan sebagai pelimpahan kewenangan dan kekuasaan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri.

Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin terselenggaranya proses demokrasi secara efektif pada tingkat lokal dan paling dekat dengan masyarakat. Penyerahan kekuasaan itu didasarkan pada kebutuhan. Tanggung jawab publik adalah kewajiban pemerintah untuk melayani rakyat. Bentuk nyata dari tanggung jawab publik dapat terlihat dalam hasil kerja, yang mencakup kinerja institusi dan pejabat pemerintah.

Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah menempatkan mereka sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kapasitas dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta mampu menangani berbagai permasalahan yang berkembang di lingkungan dan komunitas setempat. Saat ini, beragam persoalan muncul di tengah masyarakat, salah satunya adalah permasalahan sampah.

Permasalahan sampah telah berkembang menjadi isu yang sangat krusial dan kompleks di tengah masyarakat, yang berdampak tidak hanya pada pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Bandung. Ini disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan. Salah

satu dampak utama yang dirasakan oleh warga kabupaten Bandung akibat sampah adalah banjir.

Banjir kerap terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Bandung sebagai akibat meningkatnya volume sampah yang tidak disertai dengan sistem pengelolaan yang memadai. Kondisi tersebut menuntut Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memperkuat upaya penanganan sampah secara lebih serius. Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah diarahkan untuk mendukung masyarakat dalam pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap permasalahan sampah yang dihasilkan oleh aktivitas sehari-hari. Upaya ini penting karena pengelolaan sampah yang baik berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan masyarakat serta terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menitikberatkan pada sistem pengelolaan sampah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Di tingkat daerah, pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah. Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 mengenai pengelolaan sampah.

Pemerintah Kabupaten Bandung menunjuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan dan pengolahan limbah. Dalam menjalankan perannya, Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, serta menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan tersebut. Adapun tugas, fungsi, dan mekanisme kerja Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk menangani limbah, tanggung jawab utama berada pada sektor manajemen sampah. Sektor ini mencakup unit pelaksana teknis (UPT) untuk pengangkutan limbah yang terbagi ke dalam empat wilayah layanan yaitu Soreang, Baleendah, Ciparay, dan Rancaekek. Setiap UPT mengawasi beberapa kecamatan dalam wilayah kerjanya. Agar pengelolaan limbah berjalan dengan efisien dan efektif, setiap UPT perlu melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga dapat mencegah dampak negatif yang mungkin mengganggu kehidupan masyarakat, seperti banjir yang sering muncul saat musim hujan. Banjir ini bisa menyebabkan kemacetan di jalan akibat tertutupnya aliran oleh sampah, serta menimbulkan masalah kesehatan dan bau tidak sedap bagi warga. Berikut adalah kinerja dari masing-masing UPT:

Tabel 1.1
Rekonsiliasi Data Kuantitatif Sampah Kabupaten Bandung

No	Wilayah pelayanan UPT Pengangkutan sampah	Luas Wilayah (km ²)	jumlah penduduk	Analisis timbunan Sampah			rata-rata jumlah ritase
				Volume sampah perhari (Ton)	Volume sampah perbulan (Ton)	sampah yang terangkut (Ton)	
1	Soreang	553,84	836.213	292,674	8.780,22	14,99%	452
2	Baleendah	412,96	981.293	343,452	10.303,56	10%	339
3	Ciparay	507,14	931.916	326,170	9.785,10	7,89%	255
4	Rancaekek	285,46	773.302	270,655	8.119,65	17,53%	492
Jumlah		1.759,40	3.522.724	1.232,951	36.988,53	12,33%	1538

Sumber : Bidang Pengelolaan limbah Sampah

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa tingkat pengangkutan sampah yang dapat dilayani masih tergolong rendah, khususnya di wilayah UPT Pengangkutan Sampah Ciparay. Dibandingkan dengan UPT pengangkutan sampah lainnya, UPT

Ciparay mencatat persentase pengangkutan sampah paling rendah. Hal ini juga terlihat dari jumlah ritase yang relatif sedikit dan tidak sebanding dengan UPT Baleendah maupun UPT Soreang yang memiliki jumlah ritase lebih tinggi.

Jika ditinjau dari luas wilayah, area kerja UPT Pengangkutan Sampah Soreang mencakup wilayah yang lebih besar dibandingkan dengan Ciparay. Sementara itu, berdasarkan jumlah penduduk, wilayah kerja UPT Pengangkutan Sampah Rancaekek memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah kerja UPT Pengangkutan Sampah Ciparay. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, khususnya pada UPT Pengangkutan Sampah Ciparay, masih belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan peneliti sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk menyelidiki isu mengenai pengelolaan sampah di daerah UPT pengangkutan sampah Ciparay dengan judul "Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Dalam Mengelola Sampah (Studi Kasus Di Wilayah Kerja UPT Pengangkutan Sampah Ciparay)"

B. Identifikasi Masalah

Setelah menganalisis pengantar di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa sumber masalah seperti berikut ini:

1. Volume limbah yang diolah dan diangkut masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan limbah yang dihasilkan.
2. Proporsi sampah yang tertangani masih rendah dan tidak dikelola dengan baik.
3. Frekuensi angkutan di lokasi kerja UPT pengangkutan sampah adalah yang terendah dan tidak mencapai angka maksimal dibandingkan dengan lokasi UPT lainnya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana layanan yang diberikan oleh UPT pengangkutan sampah ciparay?

2. Bagaimana aspek ekonomi dalam pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup?
3. Bagaimana efisiensi kinerja UPT pengangkutan sampah ciparay?
4. Bagaimana efektivitas pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup?
5. Bagaimana keadilan dalam pelaksanaan layanan pengangkutan sampah?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada pemikiran mengenai isu di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menilai kualitas pelayanan UPT pengangkutan sampah Ciparay dalam mengelola limbah.
2. Mengetahui aspek ekonomi serta hasil pengelolaan sampah di area kerja UPT pengangkutan sampah Ciparay.
3. Menilai efisiensi pengelolaan sampah di lokasi UPT pengangkutan sampah Ciparay.
4. Mengukur seberapa efektif UPT pengangkutan sampah Ciparay dalam menangani dan mengelola sampah.
5. Mengetahui kesetaraan kinerja UPT pengangkutan sampah Ciparay dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat, baik dari sisi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis dalam memperkaya kajian ilmu administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan kinerja organisasi.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Melalui pelaksanaan penelitian ini, penulis berharap memperoleh tambahan pengetahuan serta wawasan baru, khususnya terkait bagaimana

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung mengelola persampahan di wilayah kerja UPT Pengangkutan Sampah Ciparay.

b. Untuk Instansi

Tim peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi berbagai pihak. Melalui hal tersebut, diharapkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah dapat ditingkatkan, khususnya di wilayah kerja UPT Pengangkutan Sampah Ciparay.

c. Untuk masyarakat umum

Para peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan serta informasi bagi pihak-pihak yang memiliki ketertarikan terhadap isu yang dikaji. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan dasar bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja UPT Pengangkutan Sampah Ciparay dalam pengelolaan persampahan. Oleh karena itu, pembahasan permasalahan tersebut memerlukan landasan teori yang relevan dengan topik kajian. Dalam menjelaskan kinerja UPT Pengangkutan Sampah Ciparay dalam pengelolaan sampah, peneliti menggunakan teori kinerja sektor publik yang dikemukakan oleh Selim dan Woodward sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi (2014:217), yaitu:

1. Layanan, yang menunjukkan seberapa baik pelayanan yang diberikan. Pelayanan, yang menggambarkan sejauh mana kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
2. Ekonomi, yang menunjukkan sejauh mana pengeluaran yang dilakukan lebih efisien atau lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang telah direncanakan.
3. Efisiensi, yang mengukur perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan

sumber daya atau biaya yang dikeluarkan

4. Efektivitas, yang menilai tingkat kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang benar-benar dicapai.
5. Kesetaraan, yang menekankan pada aspek keadilan dalam distribusi pelayanan serta penerapan kebijakan yang bersifat inklusif.

Amstrong dan Baron (1985:5) dalam Hayat (2017:58) mengatakan bahwa "kinerja adalah hasil kerja yang berkaitan dengan tujuan organisasi, konsumen, dan ekonomi. Dari sudut pandang lain, kinerja dapat diartikan sebagai apa yang dilakukan, cara melakukannya, serta hasil dari pekerjaan tersebut." Dari penjelasan itu, bisa disimpulkan bahwa kinerja mencerminkan hasil yang diraih oleh organisasi atau individu. Selain itu, dalam buku berjudul Manajemen Perubahan, Ismail Nawawi (2014:214) menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya kinerja bisa dilihat dari dua sisi, yaitu kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Kinerja karyawan dilihat dari hasil perorangan dalam organisasi, sedangkan kinerja organisasi merupakan keseluruhan kerja yang di capai oleh organisasi”

Teori ini akan memberikan pemahaman bagi peneliti tentang cara UPT pengangkutan sampah Ciparay mengelola limbah. Hal tersebut dapat ditinjau melalui cakupan pelayanan UPT, kondisi ekonomi, tingkat efisiensi dalam pengelolaan sampah, efektivitas pelaksanaan pengangkutan, serta tingkat kesetaraan yang tercermin dalam distribusi layanan UPT Pengangkutan Sampah Ciparay. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya penanganan permasalahan sampah.

Dengan lima indikator ini, diharapkan UPT pengangkutan sampah Ciparay dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengelola sampah. Selain itu, diharapkan juga bisa mengurangi berbagai hambatan yang dihadapi oleh UPT pengangkutan sampah Ciparay saat menangani sampah. Dengan demikian, sampah dalam kehidupan masyarakat bisa teratasi. Berdasarkan pemikiran yang telah dijelaskan

sebelumnya, bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

